



## Dinamika Kinerja Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pelaporan Keberlanjutan di Indonesia

Faisal Riza Rahman <sup>1\*</sup>, Yulius Wahyu Setiadi <sup>2</sup>

<sup>1</sup> STIE Pelita Nusantara, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Email ; [faisalriza@stiepena.ac.id](mailto:faisalriza@stiepena.ac.id)<sup>1</sup>, [yuliussetiadi@umb.ac.id](mailto:yuliussetiadi@umb.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl.Slamet Riyadi No.40A, Gayamsari, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [faisalriza@stiepena.ac.id](mailto:faisalriza@stiepena.ac.id)\*

**Abstract.** *The objective of this study is to determine the impact of environmental performance on the sustainability reporting of companies in Indonesia, utilizing the PROPER scale as a measurement tool. This research examines whether there is an improvement in sustainability report disclosures associated with the environmental performance assessed through the PROPER scale. The study involves companies listed on the Indonesia Stock Exchange that have published annual and sustainability reports for five consecutive years. The analytical method employed is WarpPLS, with a total of 85 observations. WarpPLS is used to identify statistical relationships between environmental performance and the intensity of sustainability reporting. The findings indicate that there is an enhancement in sustainability report disclosures when the audit committee and board of directors hold regular meetings. Companies without governance committees tend to focus more on governance improvement rather than on disclosing sustainability reports. Good environmental performance, particularly in companies with specific industry types and the presence of governance committees, enhances sustainability reporting. However, companies with strong environmental performance tend to make the audit committee and board of directors focus on other responsibilities, given that the community already understands that these companies manage their environmental impact well. This study underscores the importance of the Indonesian government's support in encouraging, facilitating, and urging companies to achieve the gold category in the PROPER scale. This not only demonstrates good environmental performance but also enhances sustainability report disclosures. This research implies that good environmental performance should be accompanied by increased transparency in sustainability reporting to truly contribute to sustainable development.*

**Keywords:** *sustainability report, industry type, governance committee, independent commissioner, audit committee, board of directors, environmental performance*

**Abstrak.** Pelaporan keberlanjutan mencerminkan kontribusi bisnis terhadap pembangunan berkelanjutan. Indonesia berupaya mengaktifkan pembangunan berkelanjutan dengan menilai perusahaan melalui skala PROPER. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kinerja lingkungan terhadap pelaporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia, dengan menggunakan skala PROPER sebagai alat ukur. Penelitian ini melibatkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama lima tahun berturut-turut. Metode analisis yang digunakan adalah WarpPLS, dengan total observasi sebanyak 85. WarpPLS digunakan untuk mengidentifikasi hubungan statistik antara kinerja lingkungan dan intensitas pelaporan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan saat komite audit dan dewan direksi melakukan pertemuan rutin. Perusahaan yang tidak memiliki komite tata kelola cenderung lebih fokus pada peningkatan tata kelola dibandingkan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan. Kinerja lingkungan yang baik, terutama pada perusahaan dengan tipe industri tertentu dan adanya komite tata kelola, meningkatkan pelaporan keberlanjutan. Akan tetapi, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung membuat komite audit dan dewan direksi fokus pada tanggung jawab lain, mengingat masyarakat sudah memahami bahwa perusahaan tersebut telah mengelola dampak lingkungannya dengan baik. Studi ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah Indonesia dalam mendukung, memfasilitasi, dan mendorong perusahaan untuk mencapai kategori emas dalam skala PROPER. Hal ini tidak hanya menunjukkan kinerja lingkungan yang baik tetapi juga meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kinerja lingkungan yang baik perlu diikuti dengan peningkatan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan untuk benar-benar memberi kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

**Kata kunci:** laporan keberlanjutan, jenis industri, komite tata kelola, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kinerja lingkungan

## **1. LATAR BELAKANG**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah isu global yang sangat penting dan vital bagi semua negara. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor swasta harus dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan SDGs. Pada umumnya, perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan besar guna mengembangkan kegiatan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingannya (Madona & Khafid, 2020). Namun, sebuah perusahaan juga harus mampu memenuhi aspek lain seperti yang tercantum dalam *Triple P Button*, yaitu Profit (Keuntungan), People (Orang), dan Planet (Planet). Transparansi informasi keuntungan, orang, dan planet dapat ditemukan dalam laporan keberlanjutan. Pemerintah Indonesia mendukung pengungkapan laporan keberlanjutan dengan menerbitkan POJK Nomor 51 (POJK, 2017), yang menjelaskan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mengungkapkan laporan keberlanjutannya mulai dari tahun 2019. Laporan-laporan ini menunjukkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Global Reporting Initiative, 2016). Menurut Falikhatun et al. (2020), laporan keberlanjutan adalah publikasi yang menampilkan model tata kelola, nilai-nilai organisasi, serta strategi dan komitmen bisnis terhadap ekonomi berkelanjutan secara global.

Kencana (2019) menyatakan bahwa dari 629 perusahaan, hanya 110 yang menerbitkan laporan keberlanjutan mereka. Menurut Arumsari dan Asrori (2019), hanya 12,90% perusahaan yang terdaftar di BEI menerbitkan laporan keberlanjutan mereka pada tahun 2014–2015. Pada tahun 2016–2018, angka ini hanya mencapai 46% (Azzaki, 2019). Sementara itu, Indrianingsih dan Agustina (2020) menunjukkan bahwa rata-rata 35,59% perusahaan non-keuangan mengungkapkan laporan keberlanjutan mereka. Data dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI masih kurang aktif dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia dan cara-cara untuk meningkatkan pengungkapan tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Székely dan Vom Brocke (2017), Adams (2020), dan La Torre et al. (2020) menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah sarana penting untuk menyajikan informasi lingkungan, sosial, dan transparan, serta meningkatkan kesadaran tentang kebijakan, tindakan, dan strategi perusahaan terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Junior et al. (2014) dan La

Torre et al. (2020) menyimpulkan bahwa laporan keberlanjutan bukanlah dokumen biasa, melainkan cakupan yang komprehensif dan mendetail mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai hasilnya, laporan keberlanjutan menjadi instrumen untuk menjaga dan meningkatkan citra perusahaan serta akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya alam yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, serta merangsang persaingan (Adams & Whelan, 2009; Correa-Garcia et al., 2020; Tumwebaze et al., 2022).

Penelitian sebelumnya tentang laporan keberlanjutan memberikan hasil yang bervariasi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan. Misalnya, Bhatia dan Tuli (2017) serta Sinaga dan Fachrurrozie (2017) menunjukkan bahwa jenis industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sebaliknya, Dissanayake et al. (2019) dan Hidayah et al. (2019) menyimpulkan bahwa jenis industri tidak mempengaruhi pelaporan keberlanjutan. Selain itu, Aniktia dan Khafid (2015) serta Safitri dan Saifudin (2019) menyatakan bahwa komite tata kelola berdampak positif terhadap pelaporan keberlanjutan, namun Azzaki (2019) dan Hidayah et al. (2019) menunjukkan hasil yang bertentangan.

Madona dan Khafid (2020) serta Nuraeni dan Darsono (2020) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keberlanjutan. Namun, Dewi dan Pitriasari (2019) serta Indrianingsih dan Agustina (2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berdampak pada pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, Aniktia dan Khafid (2015) serta Ruhana dan Hidayah (2020) menemukan bahwa komite audit dapat mempengaruhi pelaporan keberlanjutan, sementara Arumsari dan Asrori (2019) serta Dewi dan Pitriasari (2019) menyimpulkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan.

Inkonistensi hasil ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor lain. Kondisi pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia belum optimal, dan berbagai penelitian yang ada memberikan peluang untuk analisis yang lebih mendalam terkait masalah ini di Indonesia. Deegan (2004) mengungkapkan bahwa teori pemangku kepentingan menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi tentang aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Donaldson dan Preston (1995) berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan membuat organisasi memperluas tanggung jawabnya kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya kepada investor atau pemilik saja.

Jenis industri merupakan karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan risiko, jenis bisnis, lingkungan, dan karyawan perusahaan. Jenis industri diklasifikasikan menjadi profil

rendah dan profil tinggi. Entitas dengan profil tinggi akan mendapatkan perhatian lebih dari publik karena interaksinya dengan berbagai pihak dalam operasional bisnisnya (Sinaga & Fachrurrozie, 2017). Perusahaan-perusahaan ini cenderung memperluas pengungkapan, seperti laporan keberlanjutan, untuk mengurangi tekanan dari aktivis lingkungan dan sosial. Bhatia dan Tuli (2017) serta Sinaga dan Fachrurrozie (2017) menunjukkan bahwa jenis industri berdampak positif terhadap pelaporan keberlanjutan. Perusahaan dengan tingkat sensitivitas lingkungan yang tinggi akan lebih memperhatikan pengungkapan kinerja lingkungan mereka untuk mendapatkan legitimasi publik (Solikhah & Winarsih, 2016). Teori legitimasi menjelaskan bahwa entitas dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung lebih sering mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk memenuhi ekspektasi publik.

Komite tata kelola bertugas meninjau kebijakan GCG (tata kelola perusahaan yang baik) bersama dewan komisaris dan memastikan konsistensi implementasinya, termasuk yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis (KNKG, 2006). Sesuai dengan teori pemangku kepentingan, keberadaan komite tata kelola di perusahaan akan mendorong implementasi dan konsistensi GCG yang baik. Komite ini dapat merekomendasikan berbagai isu lingkungan dan sosial yang lebih luas untuk dilaporkan melalui laporan keberlanjutan sebagai bagian dari prinsip transparansi GCG. Komite audit juga memainkan peran penting dalam meninjau informasi yang akan dipublikasikan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Rapat dewan direksi yang efektif dalam manajemen risiko, tanggung jawab sosial, dan komunikasi juga dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif mengungkapkan laporan keberlanjutan.

H<sub>1</sub> : Industry type berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.

H<sub>2</sub> : Governance committee berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.

H<sub>3</sub> : Audit committee berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.

H<sub>4</sub> : Board of directors berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.

H<sub>5</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara industry types dan sustainability reporting

H<sub>6</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara governance committees dan sustainability reporting.

H<sub>7</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara audit committee dan sustainability reporting.

H<sub>8</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara board of directors dan sustainability reporting

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memperoleh data dari situs web BEI dan situs web resmi masing-masing perusahaan. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keberlanjutan dan laporan tahunan. Berdasarkan teknik purposive sampling, diperoleh 40 perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Selama lima tahun berturut-turut, perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan;
2. Perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan menggunakan pedoman GRI-G4 dan standar Global Reporting Initiative (GRI); dan
3. Perusahaan yang memperoleh peringkat PROPER selama lima tahun berturut-turut.

Pada akhirnya, diperoleh 85 unit analisis yang diproses untuk pengujian hipotesis menggunakan WarpPLS. Pelaporan keberlanjutan diukur menggunakan standar GRI-4; jumlah item dalam laporan dibagi dengan total seluruh item GRI. Jenis industri diukur dengan dummy (1 untuk kode profil tinggi dan 0 untuk kode profil rendah). Komite tata kelola juga diukur dengan dummy (1 jika perusahaan memiliki komite tata kelola dan 0 jika tidak ada). Variabel komite audit dan dewan direksi diukur berdasarkan jumlah pertemuan per tahun. Sementara itu, kinerja lingkungan diukur berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui PROPER (5 – level emas, 4 – level hijau, 3 – level biru, 2 – level merah, dan 1 – level hitam).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1 Analisa Statistika Deskriptif**

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
Audit Committee	4	65	14,109	12,227
Board of Directors	10	54	20,912	11,390
Environmental Performance	3	5	3,719	0,710
Sustainability Reporting	0,072	0,949	0,355	0,190

Sumber : olahdata WarpPLS, 2024

**Tabel 2 Model Fit dan Quality Indices**

Kriteria	Nilai	Batasan	Keterangan
Average Path Coefficient	0,036	$\leq 0.05$	Model Fit
Average R-Squared	0,001	$\leq 0.05$	Model Fit

Average Adjusted R-Squared	0,024	$\leq 0.05$	Model Fit
Average Block VIF	1,937	Ideal ketika $\leq 3,3$	Ideal
Average Full Collinearty VIF	1,718	Ideal ketika $\leq 3,3$	Ideal
Tenenhaus GoF	0,486	Terlalu besar jika $\geq 0,36$	Terlalu Besar
Sympson's Paradox Ratio	0,777	Diterima apabila $\geq 0,7$	Diterima
R-squared Contribution Ratio	0,856	Diterima apabila $\geq 0,9$	Tidak Diterima
Statistical Suppression Ratio	0,893	Diterima apabila $\geq 0,7$	Diterima
Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio	0,799	Diterima apabila $\geq 0,7$	Diterima

Sumber : olahdata WarpPLS, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa standar deviasi untuk pelaporan keberlanjutan, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan kinerja lingkungan lebih kecil daripada nilai rata-rata; dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi data hampir sama. Variabel jenis industri dan komite tata kelola adalah variabel dummy, sehingga diuji menggunakan distribusi frekuensi. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa persentase perusahaan berprofil rendah lebih kecil daripada perusahaan berprofil tinggi; 23,50% perusahaan merupakan jenis profil rendah dibandingkan dengan 76,50% perusahaan profil tinggi. Selain itu, 41,20% perusahaan telah membentuk komite tata kelola, sedangkan 58,80% perusahaan tidak memiliki komite tata kelola. Tabel 2 menunjukkan hanya satu indeks yang tidak dapat diterima, tetapi model tersebut tetap dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Tidak semua indeks harus sesuai dan diterima ketika sebuah studi bertujuan untuk menguji hipotesis (Kock, 2017). Tabel 3 menunjukkan ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

**Tabel 3 Uji Hipotesis**

Hipotesis	$\beta$	Sig.	Hasil
H <sub>1</sub> : Industry type berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.	0,040	0,228	Ditolak

H <sub>2</sub> : Governance committee berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.	-0,220	0,012**	Ditolak
H <sub>3</sub> : Audit committee berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.	0,492	0,000***	Diterima
H <sub>4</sub> : Board of directors berpengaruh positif terhadap sustainability reporting.	0,154	0,053*	Diterima
H <sub>5</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara industry types dan sustainability reporting.	0,192	0,021**	Diterima
H <sub>6</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara governance committees dan sustainability reporting.	0,170	0,048**	Diterima
H <sub>7</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara audit committee dan sustainability reporting.	-0,138	0,094*	Diterima
H <sub>8</sub> : Environmental performance memoderasi hubungan antara board of directors dan sustainability reporting	-0,137	0,096*	Diterima

Sumber : olahdata WarpPLS, 2024

Jenis industri tidak mempengaruhi pelaporan keberlanjutan. Temuan ini tidak mendukung teori legitimasi; jenis industri hanya menjelaskan perbedaan karakteristik perusahaan terkait risiko, bidang bisnis, lingkungan, dan karyawan perusahaan. Aktivis lingkungan dan sosial tidak hanya fokus pada perusahaan berprofil tinggi, tetapi juga pada entitas yang tidak berupaya mengendalikan dampak lingkungan dan sosial. Selain itu, negara-negara, termasuk Indonesia, secara aktif mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 51 Tahun 2017 (Legislation Republic Indonesia, 2007; POJK, 2017). Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan bentuk kesadaran manajemen terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, apakah perusahaan berprofil tinggi atau rendah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan; yang lebih penting adalah kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan demi menjaga keberlanjutan bisnisnya (Hidayah et al., 2019; Dissanayake et al., 2019).

Komite tata kelola justru berdampak negatif terhadap pelaporan keberlanjutan, yang bertentangan dengan teori pemangku kepentingan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel belum membentuk komite tata kelola, sehingga perusahaan lebih fokus memastikan tata kelola perusahaan berjalan baik melalui departemen lain. Pandangan ini berasal dari teori agensi yang menyoroti potensi konflik dalam tata kelola perusahaan (Ruwanti et al., 2019). Masalah tata kelola yang tidak ditangani oleh komite khusus dapat mempersulit perusahaan dalam mengatasi masalah agensi dan dapat mengurangi keberanian perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang komprehensif (Ariyani & Hartomo, 2018). Namun, komite audit ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keberlanjutan karena mereka memastikan manajemen menghasilkan laporan yang lengkap dan dapat dipercaya, serta mendorong perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan (Dewi & Pitriasari, 2019; Indrianingsih & Agustina, 2020; Ruhana & Hidayah, 2020).

KNKG (2006) menyatakan bahwa dewan direksi memiliki lima fungsi: manajemen risiko, manajemen, komunikasi, pengendalian internal, dan tanggung jawab sosial; dewan direksi juga harus memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan akan menguntungkan perusahaan. Perusahaan dapat lebih memahami pentingnya laporan keberlanjutan ketika dewan direksi mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik, sehingga mendorong perusahaan untuk menyajikan kegiatan tanggung jawab sosial melalui pelaporan mereka. Tabel 1 menunjukkan bahwa rapat dewan direksi diadakan sebanyak 30 kali per tahun. Rapat ini efektif untuk membahas hal-hal penting bagi perusahaan, termasuk pelaporan keberlanjutan, karena komunikasi yang lancar antara berbagai pihak dalam dewan direksi. Sesuai dengan teori pemangku kepentingan, rapat dewan direksi akan memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan guna menjalankan tugas mereka dan menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Latifah et al. (2019) dan Sinaga dan Fachrurrozie (2017) mengungkapkan bahwa dewan direksi berdampak positif terhadap pelaporan keberlanjutan. Namun, studi ini bertentangan dengan Bhatia dan Tuli (2017), Fuadah et al. (2018), serta Indrianingsih dan Agustina (2020), yang menemukan bahwa dewan direksi tidak memengaruhi laporan keberlanjutan.

Profil tinggi atau rendah merupakan pengukuran variabel jenis industri. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa 76,5% sampel adalah perusahaan dengan profil tinggi yang sensitif terhadap respons publik terhadap dampak produksinya. Sensitivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan akan mendorong perhatian lebih terhadap pengungkapan kinerja lingkungan

yang lebih luas dan lebih baik untuk mendapatkan legitimasi dan menghindari tekanan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial (Solikhah & Winarsih, 2016). Dalam hal ini, kinerja lingkungan yang baik dari perusahaan mendorong perusahaan berprofil tinggi untuk menampilkan laporan keberlanjutan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa entitas dengan kinerja lingkungan yang sangat baik cenderung sering melakukan pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan berprofil tinggi berupaya untuk mendapatkan perhatian lebih dari publik. Perusahaan dengan manajemen lingkungan yang sangat baik akan lebih sering menerbitkan laporan keberlanjutan mereka untuk mendapatkan legitimasi dari publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah kinerja lingkungan (dinilai melalui skala PROPER) dapat secara signifikan mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih sering mengungkapkan laporan keberlanjutan ketika komite audit dan dewan direksi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dalam meninjau informasi dan mematuhi peraturan. Perusahaan yang tidak memiliki komite khusus (seperti komite tata kelola) lebih fokus pada peningkatan tata kelola perusahaan daripada pengungkapan laporan keberlanjutan. Penilaian kinerja lingkungan perusahaan di Indonesia menggunakan skala PROPER secara umum belum optimal karena belum mencapai kategori emas – saat ini masih berada pada kategori biru (dua tingkat di bawah kategori emas).

Kinerja lingkungan yang baik dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan terkait dengan jenis industri dan komite tata kelola. Namun, kinerja lingkungan justru menurunkan tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan ketika dikaitkan dengan komite audit dan dewan direksi. Skala PROPER mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan di Indonesia. Namun, perusahaan di Indonesia tidak seharusnya hanya mengandalkan peringkat PROPER untuk memberikan informasi kepada publik. Mereka juga perlu mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk memperluas jangkauan pengungkapan, sehingga komunitas global, tidak hanya di Indonesia, dapat memahami bahwa mereka telah berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan di Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja lingkungan mereka untuk mencapai kategori emas dalam skala PROPER. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memperhatikan, memfasilitasi, dan mendorong perusahaan untuk mencapai kategori emas dengan menerapkan strategi yang tepat. Pengelolaan lingkungan yang baik juga merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adams, C. A. (2020). Sustainability reporting and value creation. *Social and Environmental Accountability Journal*, 40(3), 191-197. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2020.1837643>
- Adams, C. A., & Whelan, G. (2009). Conceptualising future change in corporate sustainability reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(1), 118-143. <https://doi.org/10.1108/09513570910923033> Aniktia
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan sustainability reporting [Effect of good corporate governance mechanism and financial performance on sustainability reporting disclosure]. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1-10. (In Indonesian). Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/8303>
- Ariyani, A. P., & Hartomo, O. D. (2018). Analysis of key factors affecting the reporting disclosure indexes of sustainability reporting in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(1), 15-25. Retrieved from <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2018/08/ACC-43.pdf>
- Arumsari, Y., & Asrori. (2019). The analysis of sustainability report disclosure in the companies listed on the IDX year 2014–2016. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 207-213. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/26419>
- Azzaki, M. R. (2019). Corporate social responsibility dalam memoderasi pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap sustainability report (Study empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016–2018) [Corporate social responsibility in moderating the influence of corporate characteristics and corporate governance on sustainability report (Empirical study on manufacturing companies listed on the IDX 2016–2018)]. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 114-124. (In Indonesian). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/20567>
- Bhatia, A., & Tuli, S. (2017). Corporate attributes affecting sustainability reporting: An Indian perspective. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 322-340. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2015-0057>
- Correa-Garcia, J. A., Garcia-Benau, M. A., & Garcia-Meca, E. (2020). Corporate governance and its implications for sustainability reporting quality in Latin American business groups. *Journal of Cleaner Production*, 260, 121142. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121142>
- Deegan, C. (2004). Environmental disclosures and share prices – A discussion about efforts to study this relationship. *Accounting Forum*, 28(1), 87-97. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2004.04.007>
- Dissanayake, D., Tilt, C., & Qian, W. (2019). Factors influencing sustainability reporting by Sri Lankan companies. *Pacific Accounting Review*, 31(1), 84-109. <https://doi.org/10.1108/PAR-10-2017-0085>

- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>
- Falikhatun, F., Wahyuni, S., Niswah, M. A., & Nilasakti, A. O. (2020). Financing type and sustainability reporting: Financial performance as mediating variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 12(1), 34-45. <https://doi.org/10.15294/jda.v12i1.24930>
- Global Reporting Initiative. (2016). GRI 101: Foundation 2016 (30 p.). Retrieved from <https://www.globalreporting.org/standards/media/1036/gri-101-foundation-2016.pdf>
- Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2014). Sustainability reporting and assurance: A historical analysis on a worldwide phenomenon. *Journal of Business Ethics*, 120, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1637-y>
- KNKG. (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia [General guidelines for good corporate governance in Indonesia]. Jakarta: Komisi Nasional Kebijakan Governance. (In Indonesian). Retrieved from <https://www.ecgi.global/download/file/fid/9661>
- Kock, N. (2017). WarpPLS user manual: Version 6.0. Laredo, TX, USA: ScriptWarp Systems
- La Torre, M., Sabelfeld, S., Blomkvist, M., & Dumay, J. (2020). Rebuilding trust: Sustainability and non-financial reporting and the European Union regulation. *Meditari Accountancy Research*, 28(5), 701-725. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2020-0914>
- Legislation Republic Indonesia. (2007). Law Number 40 of 2007, Pub. L. No. 40. Concerning Limited Liability Companies. Retrieved from [https://ojk.go.id/Files/box/keuanganberkelanjutan/UU\\_PT\\_No\\_40\\_tahun\\_2007.pdf](https://ojk.go.id/Files/box/keuanganberkelanjutan/UU_PT_No_40_tahun_2007.pdf)
- Lucia, L., & Panggabean, R. R. (2018). The effect of firm's characteristic and corporate governance to sustainability report disclosure. *SEIJ (Social Economics and Ecology International Journal)*, 2(1), 18-28. Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3191985](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3191985)
- Székely, N., & Vom Brocke, J. (2017). What can we learn from corporate sustainability reporting? Deriving propositions for research and practice from over 9,500 corporate sustainability reports published between 1999 and 2015 using topic modelling technique. *PloS One*, 12(4), e0174807. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174807>
- Tumwebaze, Z., Bananuka, J., Kaawaase, T. K., Bonareri, C. T., & Mutesasira, F. (2022). Audit committee effectiveness, internal audit function and sustainability reporting practices. *Asian Journal of Accounting Research*, 7(2), 163-181. <https://doi.org/10.1108/AJAR-03-2021-0036>